

# **Hedging sebagai Respon Rusia dan Jepang dalam Menghadapi Dinamika Sistem Internasional Kontemporer**

**Yohanes Putra Suhito**

*Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Terjadinya pergeseran tatanan internasional menuju ke arah hegemoni hierarkis yang berjalan paralel dengan kemunculan fase dekonsentrasi internasional mendorong terciptanya sebuah relasi antar negara yang semakin kompleks. Di satu sisi, struktur hegemoni hierarkis mengakibatkan munculnya ranking power antar negara kekuatan utama di kawasan maupun global. Selain itu, fase dekonsentrasi internasional menjelaskan bahwa terdapat kontestasi di antara dua negara pre-eminen yakni Amerika Serikat yang berstatus sebagai delegitimized world power serta Tiongkok sebagai challenger yang kemudian menimbulkan situasi ketidakpastian di level perpolitikan global. Adanya dinamika sistemik tersebut mendorong timbulnya rasa kekhawatiran Rusia dan Jepang selaku negara third-tier terhadap masa depan relasinya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat karena kedua negara tersebut dapat bertransformasi menjadi potensi ancaman bagi Rusia dan Jepang. Di tengah posisi sulit tersebut, Rusia dan Jepang berusaha mengimplementasikan kebijakan yang fleksibel namun strategis yakni melalui strategi hedging. Implementasi strategi tersebut dapat terlihat melalui lima indikator utama yakni limited bandwagoning, pragmatisme ekonomi, penolakan terhadap dominasi, binding engagement, dan indirect balancing.*

**Kata-kata kunci:** *hegemoni hierarkis, dekonsentrasi internasional, Rusia, Jepang, hedging.*

## **ABSTRACT**

*The shift of the international order towards a hierarchical hegemony structure that runs parallel with the emergence of the international deconcentration phase encourages the creation of an increasingly complex inter-state relationship. On the one hand, the hierarchical hegemonic structure leads to the emergence of power rankings among the major power at both of regional and global levels. In addition, international deconcentration phase explained that there is a contestation between the two pre-eminent countries i.e. United States as delegitimized world power and China as the challenger. Those contestation ultimately driving some uncertainty in the global political situation. Futhermore, that dynamics encourages Russia and Japan as the third-tier countries to reformulate foreign policy that related to China and the United States because there is a possibility that the two countries can be transformed as a future threat for Russia and Japan. Therefore, Russia and Japan are trying to implement a flexible yet strategic policy through hedging strategies. The implementation of these strategies can be seen through five main indicator i.e. limited bandwagoning, economic pragmatism, the rejection of domination, binding engagement, and indirect balancing.*

**Keywords:** *hierarchical hegemony, international deconcentration, Russia, Japan, hedging.*

Pasca Perang Dingin, terjadi perubahan tatanan internasional menuju ke arah yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah pergeseran tatanan bipolar menuju tatanan multipolar yang dicirikan oleh gradasi *power* bersifat hierarkis. Hal tersebut mendorong sebuah pola hubungan antar negara yang semakin kompleks dikarenakan terdapat *ranking power* yang terbentuk baik di level regional maupun global. Selain itu, secara paralel, sistem internasional juga sedang mengalami fase dekonsentrasi internasional. Fase tersebut ditandai dengan adanya kontestasi dua negara *pre-eminent* yakni *delegitimized world power* dan *challenger* yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketidakpastian di level perpolitikan global. Kedua hal tersebut membuat negara-negara berada dalam situasi yang cukup sulit dalam rangka merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Oleh karenanya, *hedging* kemudian menjadi salah satu alternatif kebijakan strategis di tengah situasi tersebut. Goh menjelaskan *hedging* sebagai *middle position* yang dapat mencegah atau menghindari keberpihakan pada satu sisi demi mendapatkan sebuah keuntungan maksimal tanpa menghilangkan kewaspadaan akan potensi ancaman di masa mendatang (Goh, 2006). Strategi ini dapat membuat negara selalu waspada akan ketidakpastian perilaku partner kerja samanya di masa depan dengan cara menerapkan unsur kerja sama dan kompetisi sekaligus. Strategi inilah yang diimplementasikan oleh Jepang dan Rusia selaku negara *third-tier* di balik kontestasi dua negara *pre-eminent* yakni Amerika Serikat yang berpredikat sebagai *delegitimized world power* dan Tiongkok yang berpredikat sebagai *challenger*. Salah satu alasan utama implementasi strategi *hedging* oleh Jepang dan Rusia adalah situasi kontestatif di antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mempengaruhi relasi Rusia-Tiongkok ataupun relasi Amerika Serikat-Jepang. Pengaruh yang dimaksudkan disini ialah adanya peluang bagi transformasi Amerika Serikat maupun Tiongkok sebagai potensi ancaman bagi Jepang dan Rusia. Lebih jauh, manifestasi strategi *hedging* Rusia-Jepang dapat dilihat melalui lima indikator utama yakni *limited bandwagoning*, *binding engagement*, *economic pragmatism*, *dominance denial*, dan *indirect balancing* yang tergambar dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Respon Rusia-Jepang terhadap Kontestasi Amerika Serikat-Tiongkok**

Countries	Bandwagoning Strategy (Pure Form)	Hedging Strategy					Balancing Strategy (Pure Form)
		Return-Maximizing Options			Risk –Contingency Options		
		Limited Bandwagoning	Binding Engagement	Economic Pragmatism	Dominance Denial	Indirect Balancing	
<b>Rusia terhadap Tiongkok</b>							
<b>Jepang terhadap USA</b>							

Sumber: Dimodifikasi dari Cheng-Chwee, 2008

Secara umum, Rusia dan Jepang melakukan predisposisi kebijakan luar negeri menuju ke arah *balancing*. Pada titik netral yakni pragmatisme ekonomi, Rusia dan Jepang kemudian

bertemu dan melakukan sebuah kebijakan *rapprochement* dalam rangka penyelesaian permasalahan Kepulauan Kuril Selatan. Namun, kedua negara belum beranjak hingga titik *indirect balancing* dikarenakan baik Jepang maupun Rusia masih menganggap bahwa relasinya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok adalah sebuah hal yang strategis.

### **Perubahan Tatahan Internasional Pasca Perang Dingin: Struktur Hegemoni Hierarkis Asia Timur**

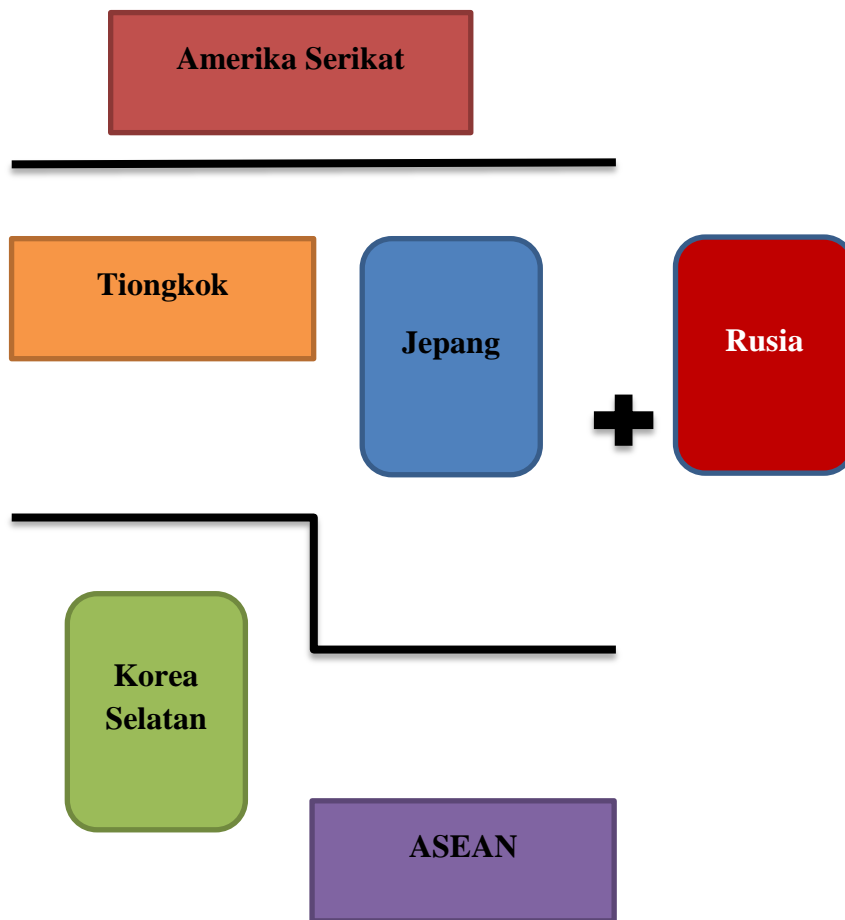
Asia Timur kemudian menjadi sebuah kawasan yang dapat merepresentasikan secara komprehensif pergeseran tatahan internasional di era pasca Perang Dingin. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dramatis yang terjadi pada tatahan di kawasan tersebut sebagai konsekuensi atas transformasi karakter *preponderant* Amerika Serikat dan kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu *emerging power* yang dipandang sebagai negara penantang potensial bagi status *preponderant* Amerika Serikat (Goh, 2013). Prakondisi bagi adanya pergeseran tatahan di kawasan Asia Timur ialah adanya *mutual recognition* atas ketidakseimbangan distribusi *power* di kawasan tersebut. Namun, hal yang menarik ialah negara-negara Asia Timur tidak berusaha melakukan *balancing* terhadap superioritas Amerika Serikat tetapi justru mengupayakan renegotiasi terkait konsensus nilai, hak, dan kewajiban Amerika Serikat *vis-a-vis* negara lainnya di kawasan tersebut (Goh, 2013).

Kompleksitas interaksi antar aktor di kawasan Asia Timur setidaknya didasari oleh tiga faktor utama. Pertama, Amerika Serikat selaku hegemon yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur melalui proyeksi *power* mulai mengalami tekanan yang cukup serius. Tekanan tersebut lebih banyak ditujukan pada kapabilitas dan komitmen Amerika Serikat dalam mengelola tatahan internasional pasca Perang Dingin. Hal ini sedikit banyak didorong oleh dua hal utama yakni aksi unilateral Amerika Serikat dalam merespon tragedi 9/11 dan invasi Iraq di tahun 2003 serta adanya krisis finansial global 2008 yang melemahkan perekonomian Amerika Serikat secara signifikan (Goh, 2013). Fenomena-fenomena tersebut pada akhirnya menimbulkan krisis identitas dan otoritas pada diri Amerika Serikat dalam menjalankan perannya sebagai hegemon khususnya di kawasan Asia Timur. Kedua, secara paralel, Tiongkok berhasil berkembang sebagai kekuatan baru yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa signifikan, peningkatan *military expenditures*, serta perbaikan profil politik di level global. Namun, Tiongkok dianggap lebih diplomatis dan kooperatif sehingga kurang mencerminkan ekspektasi revisionis. Oleh karenanya, Tiongkok diharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mempertahankan tatahan yang telah ada atau membangkitkan semangat revolusioner yang lebih besar guna membentuk tatahan yang baru (Goh, 2013). Sedangkan faktor ketiga berkorelasi dengan peningkatan peran negara-negara kecil dan aktor non-negara dalam proses pembentukan kembali tatahan internasional.

Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan natur hegemoni Amerika Serikat yang semakin plural karena adanya proses renegotiasi kompleks di antara Amerika Serikat dengan negara-negara Asia Timur terkait konsensus nilai, hak, dan kewajiban Amerika Serikat *vis-a-vis* negara lainnya di kawasan tersebut sehingga hegemoni menjadi terkonsolidasikan di antara *great powers* dan *non-great powers*. Hal tersebut mengakibatkan hegemoni Amerika Serikat dan tatahan di Asia Timur lebih dipahami sebagai sebuah *social compact* yakni pertukaran janji dan kesepakatan mengikat yang bersifat resiprokal dan kondisional di mana satu pihak akan menyetujui bagiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya sebagai timbal balik atas kepatuhan pihak yang diajak bernegosiasi (Goh, 2013). Renegosiasi dan kontestasi yang terjadi di kawasan Asia Timur sejak berakhirnya Perang Dingin berhasil membentuk sebuah tatahan hierarkis berlapis di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Goh, 2013). Tatahan hierarkis ini berada pada pemahaman bahwa Amerika Serikat memiliki otoritas namun di bawah otoritas tersebut, terdapat urutan *ranking* kekuatan utama kawasan Asia Timur yang lainnya. Struktur hierarkis ini kemudian mengintegrasikan Tiongkok sebagai kekuatan terbatas, pro

status-quo, dan subordinat di bawah posisi Amerika Serikat selaku hegemon regional sekaligus global (Goh, 2013). Hal tersebut terlihat jelas melalui gambar 1.2.

**Gambar 1.2. Tatanan Hierarkis di Asia Timur**



Sumber: Dimodifikasi dari Goh, 2013

Terdapat setidaknya dua proses sosial yang mendasari terbentuknya tatanan hierarkis tersebut. Pertama, proses pembentukan identitas dan prinsip-prinsip bersama yang mempengaruhi status dan *ranking* negara *great powers*. Kedua, adanya dinamika sosial keterlibatan dan perlawanan yang menciptakan sekaligus mereproduksi tatanan hierarkis. Dinamika sosial yang terjadi dalam tatanan hierarkis ialah keseimbangan sentral di dalam kondisi ketidakseimbangan kekuatan (Goh, 2013). Pada akhirnya, kompleksitas hubungan serta transisi tatanan internasional menuju ke arah yang hierarkis mendorong negara-negara di kawasan Asia Timur memilih strategi *hedging* sebagai respon strategis dalam rangka menghadapi *preponderant power*.

### **Fase Dekonsentrasi Sistem Internasional Kontemporer**

Fase dekonsentrasi adalah fase ketika *world power* kemudian mengalami sebuah proses delegitimisasi dan tantangan dari aktor lain sebagai *challenger*. Proses tersebut didorong oleh realitas bahwa *world power* tidak menjalankan kapasitasnya sebagai negara *pre-eminent* yang mampu menjamin *common goods* bagi anggota sistem internasional. Selain itu, dapat terlihat pula *world power* yang mengalami fase delegitimisasi akan berusaha untuk menjaga *status quo* yang dimilikinya melalui berbagai cara, salah satunya melalui intervensi militer sehingga memicu munculnya potensi konflik yang kemudian terakumulasi secara kontinu. Hal ini didukung oleh adanya fakta bahwa kontestasi yang terjadi di antara *delegitimized world power* dan *challenger* juga mampu mendorong kemunculan sebuah

sistem baru yang sifatnya multipolar. Sistem tersebut mengakibatkan *power* tidak terkonsentrasi di satu atau dua kutub kekuatan sehingga cenderung membuka peluang bagi terjadinya konflik besar di level global (Modelski, 1981 dalam Hudson, 2014).

George Modelski (1981 dalam Hudson, 2014) menjelaskan bahwa terdapat dua indikator utama yang menandai fase dekonsentrasi di level sistem internasional yakni adanya peningkatan kapabilitas sektor militer berbagai negara serta pertumbuhan ekspansif ekonomi global. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat berhasil bertransformasi menjadi salah satu negara-bangsa yang disegani dan memiliki akses terhadap *power* di level internasional karena status mereka sebagai satu-satunya kekuatan industri dunia yang secara ekonomi dinilai mampu bertahan dari efek destruktif Perang Dunia Kedua di kawasan Eurasia. Wallerstein (2003) menyatakan bahwa *turning point* awal kebangkitan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon adalah ketika diadakannya Konferensi Yalta yang dihadiri oleh pemimpin dari tiga negara sentral dalam aliansi Sekutu di era Perang Dunia Kedua yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya. Hasil konferensi tersebut menjadi sebuah *geopolitical constraints* di pertengahan abad ke-20. Kesepakatan tersebut menjadi sebuah legitimasi atas aksi-aksi Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua (Wallerstein, 2003).

Selain itu, status Amerika Serikat sebagai *world power* juga semakin terlegitimasi oleh Sistem Bretton Woods sebagai salah satu *order* yang mampu menjamin *common goods* anggota sistem internasional pasca Perang Dunia Kedua di dalam aspek ekonomi. Namun, sistem ini pada akhirnya mengalami keruntuhan ketika terjadi krisis kredibilitas terhadap dollar Amerika yang berujung pada pembatalan sistem Bretton Woods dan konvertabilitas dollar Amerika terhadap emas dengan konsekuensi penurunan peran dan status Amerika Serikat sebagai negara hegemon pemegang order dalam sistem moneter dan finansial global (Helleiner, 2008).

Lebih jauh, dalam aspek militer, Wallerstein menyatakan bahwa pasca Perang Dunia Kedua hingga saat ini, militer telah menjadi salah satu bahkan satu-satunya kekuatan utama Amerika Serikat (Wallerstein, 2003). Meskipun demikian, status *military powerhouse* dunia tidak membuat Amerika Serikat mendapatkan berbagai kemenangan mudah dalam perang yang mereka jalani. Setidaknya, perlu dicatat bahwa dalam tiga konflik besar pasca 1945 yakni Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Teluk, hasil yang dicapai oleh militer Amerika Serikat hanyalah dua kali imbang dan satu kekalahan yang memalukan (Wallerstein, 2003). Pada akhirnya, terjadinya tragedi 9/11 semakin mengguncang status Amerika Serikat sebagai *delegitimized world power*.

Amerika Serikat yang sedang mengalami fase *declining* kemudian menghadapi suatu tantangan serius dari Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh transformasi Tiongkok sebagai salah satu *emerging power* baik di bidang ekonomi dan militer. Di bidang ekonomi, Tiongkok meskipun belum terintegrasi secara maksimal ke dalam perekonomian dan perdagangan global sebagai akibat dari isu-isu domestik membuktikan bahwa mereka masih mampu memiliki neraca perdagangan sebesar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, ekspansi ekonomi Tiongkok juga memiliki dampak yang luar biasa signifikan bagi negara-negara lainnya. Lebih jauh, dalam periode 2004-2007, Tiongkok bersama dengan Amerika Serikat berhasil menjadi *global growth leadership* (Bergsten et.al., 2008). Bukti nyata lain transformasi Tiongkok sebagai kekuatan adidaya ekonomi global juga dapat terlihat melalui perubahan status Tiongkok sebagai negara dengan GDP dan tingkat ekspor global terbesar kedua di dunia (Bergsten et.al., 2008).

Sedangkan di bidang militer, Tiongkok telah bertransformasi menjadi salah satu negara dengan kapabilitas militer yang termodernisasi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan mantan Presiden Tiongkok periode 2003 hingga 2013 yakni Hu Jintao, "Tiongkok haruslah memfokuskan dirinya pada pembangunan ekonomi dan kapasitas militer agar Tiongkok memiliki kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan militer yang kuat dalam

rangka penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat Tiongkok dalam segala aspeknya” (Jintao dalam Bergsten et.al., 2008). Dalam hal kuantitas, PLA adalah angkatan bersenjata terbesar nomor dua di dunia dengan jumlah angkatan bersenjata aktif sebesar kurang lebih 4,5 juta personil. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah di dekade selanjutnya. Dalam segi anggaran, meski jauh lebih kecil dari total proyeksi anggaran pertahanan Amerika Serikat yang mencapai kisaran \$600 miliar, proyeksi anggaran pertahanan Tiongkok dipastikan meningkat 7% dibanding anggaran tahun lalu yakni mencapai kisaran \$141 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa Tiongkok memiliki keseriusan dalam mendorong peningkatan kualitas peralatan serta teknologi militer mereka. Pada akhirnya, kontestasi Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan situasi dan kondisi ketidakpastian perpolitikan baik di level regional maupun global.

### **Respon Rusia Dan Jepang Terhadap Dinamika Sistem Internasional Kontemporer**

Renegosiasi dan kontestasi yang terjadi di kawasan Asia Timur sejak berakhirnya Perang Dingin berhasil membentuk sebuah tatanan hierarkis berlapis di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Goh, 2013). Tatanan hierarkis ini berada pada pemahaman bahwa Amerika Serikat memiliki otoritas namun di bawah otoritas tersebut, terdapat urutan *ranking* kekuatan utama kawasan Asia Timur yang lainnya. Struktur hierarkis ini kemudian mengintegrasikan Tiongkok sebagai kekuatan terbatas, pro status-quo, dan subordinat di bawah posisi Amerika Serikat selaku hegemon regional sekaligus global. Sedangkan Jepang memiliki status sebagai pendukung utama hegemoni sekaligus berpotensi menjadi *swing-state* (Goh, 2013). Lebih jauh, kontestasi dua negara *pre-eminent* yakni Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong munculnya dilema bagi Jepang dan Rusia karena kontestasi tersebut menimbulkan situasi ketidakpastian di level perpolitikan global. Selain itu, ketidakpastian tersebut juga mendorong timbulnya rasa kekhawatiran Rusia dan Jepang terhadap masa depan relasinya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat karena tidak menutup kemungkinan bahwa kedua negara tersebut dapat bertransformasi menjadi potensi ancaman masa depan bagi Rusia dan Jepang. Oleh karenanya, Rusia dan Jepang sebagai negara *third-tier* berusaha untuk merespon situasi dan kondisi tersebut.

Dalam realitasnya, salah satu bentuk respon Jepang ialah menjalankan sebuah pendekatan baru terhadap Rusia dalam rangka mendorong adanya penyelesaian sengketa isu Kepulauan Kuril Selatan sekaligus adanya penandatanganan pakta perdamaian dengan Rusia. Di sisi lain, Rusia merespon positif inisiatif Jepang tersebut yang dibuktikan dengan adanya kunjungan kenegaraan oleh Presiden Putin ke Jepang pada akhir tahun 2016. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Rusia ke Jepang dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir. Kebijakan “Russia Initiative” yang dilakukan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang kemudian direspon positif oleh Presiden Vladimir Putin memperlihatkan bahwa kedua negara sedang mengupayakan predisposisi kebijakan luar negeri ke arah *hedging*. Strategi *hedging* disini mengandung arti bahwa Rusia dan Jepang berada pada posisi yang cukup sulit di tengah kontestasi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di satu sisi, Jepang memiliki sebuah dependensi yang cukup kuat dengan Amerika Serikat, terutama dalam aspek keamanan dan militer. Namun, sikap pemerintah Amerika Serikat sedang mengarah pada *mood* untuk mengurangi komitmen militer di luar negeri (Panova & Lukin, 2016). Selain itu, Jepang juga menghadapi ancaman yang cukup nyata dari kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu *emerging power* paling berpengaruh baik di level regional maupun global. Di sisi lain, Rusia menghadapi sebuah relasi yang fluktuatif dengan Amerika Serikat beserta dengan negara aliansinya dan melihat Tiongkok sebagai salah satu partner strategis dalam kerja sama multidimensional. Namun, relasi Rusia-Tiongkok dalam realitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh pragmatisme. Hal ini terlihat melalui kebijakan Tiongkok yang sangat berhati-hati dalam penerapan sanksi G-7 atas Rusia sebagai konsekuensi atas agresifitas Rusia di Krimea (Irish Times, 2014). Oleh karena itu, upaya

harmonisasi hubungan bilateral menjadi salah satu opsi strategis bagi Rusia dan Jepang dalam menjamin kepentingan mereka di tengah situasi ketidakpastian politik global.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *hedging* sendiri dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai sebuah strategi dengan komponen multidimensional di antara spektrum *balancing* dan *bandwagoning* (lihat Tabel 1.1.). Melalui posisi tersebut, Rusia dan Jepang melakukan predisposisi kebijakan luar negeri menuju ke arah *balancing*. Pada titik netral yakni pragmatisme ekonomi, Rusia dan Jepang kemudian bertemu dan melakukan sebuah kebijakan *rapprochement* dalam rangka penyelesaian permasalahan Kepulauan Kuril Selatan. Mendekatnya kedua negara tersebut mengindikasikan bahwa Rusia dan Jepang berada pada situasi yang cukup kompleks. Seperti yang telah dijelaskan oleh Cheng-Chwee (2008) bahwa terdapat tiga kondisi utama yang mendasari *hedging* yakni tidak adanya ancaman langsung, absennya persaingan ideologi, serta belum adanya persaingan *all-out* di antara *great powers*. Dalam situasi era kontemporer, situasi tersebut terjadi pada relasi Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Di satu sisi, Rusia tidak ingin mengubah natur hubungannya dengan Tiongkok dan Jepang masih membutuhkan Amerika Serikat sebagai salah satu aliansi strategisnya. Namun di sisi lain, Rusia dan Jepang juga diliputi kekhawatiran bahwa terjadinya kontestasi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan memberikan sebuah ancaman tersendiri bagi kedua negara *third-tier* tersebut. Lebih jauh, kontestasi dua negara *pre-eminent* juga menimbulkan sebuah ketidakpastian politik global sehingga partner kerja sama sewaktu-waktu dapat bertransformasi menjadi sebuah ancaman nyata di masa mendatang. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian mendorong Rusia dan Jepang untuk mengimplementasikan kebijakan *hedging* yang dapat terlihat melalui lima indikator utama.

Indikator pertama ialah praktik *limited bandwagoning*. Rusia merupakan negara dengan kapabilitas *power* relatif yang cukup besar terutama dalam aspek militer. Hal ini dibuktikan dengan status Rusia sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di dunia (Global Fire Power, 2017). Oleh karenanya, Rusia sangat terbatas dalam melakukan praktik *bandwagoning*. Di era kontemporer, kedekatan Rusia dan Tiongkok selaku salah satu negara *pre-eminent* hanya terbatas dalam hal pelaksanaan berbagai macam program latihan bersama militer. Setidaknya dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, terdapat latihan rutin maritim tahunan atau Joint Sea yang dilaksanakan oleh angkatan laut Russian Armed Force dengan People Liberation Army (Meick, 2017). Pada kenyataannya, hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa Rusia sedang memainkan kebijakan *limited bandwagoning* dengan Tiongkok dikarenakan tidak adanya aliansi resmi khususnya di bidang militer. Vasily Kashin menjelaskan bahwa sulit bagi Rusia dan Tiongkok untuk membentuk sebuah aliansi militer formal di antara kedua negara. Alasan utama di balik hal tersebut ialah dasar konseptual kebijakan luar negeri kedua negara yang sangat menentang gagasan penciptaan dan perluasan aliansi militer (Kashin, 2017). Selain itu, Lily J. Goldstein juga menyatakan bahwa pembentukan aliansi formal dengan Tiongkok akan menjadi sebuah pertarungan penuh resiko bagi Rusia. Alasan pertama ialah dengan adanya aliansi militer formal dengan Tiongkok maka Rusia akan menghadapi tantangan yang lebih berat dari *western front* yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, khususnya dalam hal ekonomi. Alasan kedua berkaitan erat dengan adanya kontradiksi politik di antara Rusia dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dikarenakan adanya konflik di antara negara-negara tersebut dengan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan (Goldstein, 2017). Hal-hal di atas menjadi sebuah bukti nyata bahwa Rusia meski memiliki hubungan yang cukup erat dengan Tiongkok, masih mempertahankan otonominya sekaligus menghindari status *over-dependent* terhadap Tiongkok.

Sedangkan bagi Jepang, praktik *limited bandwagoning* dapat terlihat melalui pembaharuan US-Japan Defense Guidelines yang berisi peningkatan peran global aliansi kedua negara dalam menanggapi ancaman-ancaman keamanan kontemporer seperti program nuklir Korea Utara, terorisme dan radikalisme Islam, perompakan, hingga *cybersecurity*. Selain itu, dengan adanya reinterpretasi konstitusi untuk mengizinkan Jepang melakukan

pembelaan diri secara kolektif, Jepang sekarang dapat mengambil tindakan untuk membela pasukan sekutu AS atau sekutu lainnya di manapun di dunia ini, bahkan jika Jepang tidak sedang menghadapi situasi serangan langsung. Melalui kesepakatan tersebut, Jepang bergerak menuju pada hubungan yang lebih simetris dengan Amerika Serikat dengan status partner yang setara dalam menghadapi berbagai ancaman global sekaligus kompetisi *power politics* negara-negara besar (Jannuzi, 2016). Selain itu, semakin fleksibelnya status Japan Self Defense Forces mendorong munculnya era *detente* bagi aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat sehingga praktik *bandwagoning* Jepang terhadap Amerika Serikat juga semakin terbatas.

Indikator kedua ialah praktik *binding engagement*. Kebijakan *limited bandwagoning* Rusia terhadap Tiongkok kemudian mulai bergeser secara perlahan menuju ke arah kebijakan *binding engagement* yang diimplementasikan melalui penguatan relasi bilateral kedua negara melalui kerangka kerja sama internasional. Ada beberapa kerja sama internasional yang diikuti oleh kedua negara di antaranya adalah Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC, Shanghai Cooperation Organization atau SCO, hingga G-20. Keempat organisasi regional dan internasional tersebut dianggap dapat merepresentasikan kepentingan *binding* Rusia terhadap Tiongkok. Di sisi lain, Jepang merupakan negara dengan tingkat integrasi yang cukup baik dalam sistem internasional. Hal ini ditunjukkan dengan jelas melalui keanggotaan aktif Jepang dalam berbagai rezim dan organisasi internasional. Kementerian Luar Negeri Jepang mencatat bahwa Jepang telah menjadi anggota resmi dari setidaknya 40 organisasi internasional di antaranya FAO, IAEA, UNICEF, ILO, IMF, dan sebagainya (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017). Melalui keanggotaan dalam berbagai macam organisasi internasional tersebut, Jepang kemudian berusaha mengamankan kepentingannya melalui nilai, norma, dan kesepakatan bersama dalam organisasi-organisasi tersebut sehingga tidak ada praktik dominasi dan *counterbalancing* terhadap negara-negara dengan kapabilitas *power* relatif besar khususnya Amerika Serikat (Newman, 2000). Upaya Jepang untuk melakukan *binding* terhadap Amerika Serikat terlihat melalui beberapa kerangka kerja sama multilateral di antaranya Kyoto Protocol, Paris Agreement, hingga Trans Pacific Partnership. Ketiga rezim tersebut merupakan salah satu manifestasi nyata Jepang dalam melakukan praktik *binding* terhadap Amerika Serikat khususnya dalam aspek pelestarian lingkungan hidup dan kerja sama ekonomi meski pada akhirnya Amerika Serikat tidak memutuskan untuk tidak melibatkan diri dalam kesepakatan tersebut.

Indikator ketiga ialah *economic pragmatism* yang disebutkan oleh Cheng-Chwee sebagai titik netral dalam strategi *hedging*. Pragmatisme ekonomi kedua negara dapat terlihat melalui kebijakan *rapprochement* di tahun 2016. Pragmatisme ekonomi Rusia terlihat melalui respon positif terhadap kebijakan Russia Initiative Jepang pada tahun 2016. Rusia sangatlah tertarik dengan sumber daya kapital, teknologi industri, serta *output* berupa barang-barang industri dan konsumsi yang sangat berkualitas dari Jepang. Hal-hal tersebut dipandang oleh Rusia dapat sangat berguna bagi proses pembangunan Rusia khususnya di wilayah Siberia dan Timur Jauh Rusia (Akaha, 2016). Pada pertemuan Sochi, Shinzo Abe menyodorkan sebuah rancangan kerja sama ekonomi di antara Jepang dan Rusia yang mencakup delapan aspek yakni peningkatan angka harapan hidup, pembangunan kota bersih yang nyaman untuk dihuni, peningkatan intensitas pertukaran dan kerja sama antar perusahaan kecil dan menengah, bidang energi, promosi diversifikasi industri dan peningkatan produktifitas Rusia, pengembangan industri berbasis ekspor di Timur Jauh Rusia, kerja sama teknologi *cutting-edge*, serta ekspansi interaksi *people-to-people* Rusia dan Jepang (Khuziyatov, 2016). Proposal tersebut kemudian ditanggapi positif oleh pihak Rusia. Pasca pertemuan di Sochi, Abe dan Putin kemudian bertemu kembali di Vladivostok dalam serangkaian acara Eastern Economic Forum pada bulan September 2016. Dalam pertemuan itu, setidaknya terdapat kesepakatan mengenai tiga hal penting yakni adanya kerjasama Jepang-Rusia terkait dengan pembangunan dan eksplorasi di kawasan timur jauh Rusia, meresmikan upaya kerjasama tersebut di tingkat kementerian, sekaligus adanya undangan resmi kenegaraan terhadap Presiden Putin ke Jepang pada bulan Desember 2016 (Akaha, 2016). Perlu digarisbawahi bahwa energi adalah salah satu aspek krusial dalam kerja



sama ekonomi Rusia-Jepang. Bagi Rusia, teknologi industri serta investasi Jepang merupakan komponen penting bagi peningkatan produktifitas Jepang.

Di sisi lain, keputusan Jepang untuk menginisiasi *rapprochement* terhadap Rusia tidak dapat dilepaskan dari aspek pertimbangan geoekonomi. Jepang melihat bahwa Rusia merupakan salah satu negara penghasil sumber daya energi terbesar di dunia dan Timur Jauh Rusia yang notabene merupakan salah satu *focal point* kerja sama kedua negara merupakan salah satu wilayah Rusia yang memiliki sumber daya energi potensial yang sangat melimpah (Panova & Lukin, 2016). Sumber daya energi hidrokarbon yang terdiri atas tiga sumber energi primer yakni minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan salah satu ekspor utama Rusia ke Jepang. Oleh karena itu, inisiatif Jepang untuk mengadakan kerja sama dengan Rusia khususnya pembangunan di wilayah Timur Jauh Rusia tidak dapat dilepaskan dari faktor pragmatisme serta pertimbangan geoekonomi terkait keamanan energi. Melalui kerja sama tersebut, Jepang dapat melakukan diversifikasi *supply* energi mereka sehingga menjadi jaminan atas ketersediaan sumber daya bagi kebutuhan energi Jepang yang cukup krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat negara tersebut. Berbagai macam kerja sama tersebut mengindikasikan bahwa Jepang mulai mengesampingkan permasalahan politik dengan Rusia terkait sengketa Kepulauan Kuril Selatan demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar khususnya di sektor keamanan energi.

Indikator selanjutnya ialah praktik *dominance denial*. Penulis melihat bahwa sejauh ini, Rusia belum memiliki sebuah sikap tegas terkait penolakan terhadap dominasi Tiongkok. Oleh karenanya, dalam tabel 1.1. penulis menyatakan bahwa Rusia mulai bergerak ke arah tersebut, namun belum mengadopsi kebijakan penolakan terhadap dominasi tersebut secara penuh. Hal ini dapat terlihat melalui dua indikator utama yakni belum adanya aliansi politik dan militer formal yang terjalin di antara kedua negara serta adanya salah satu *statement* penolakan Rusia atas tawaran *mutual recognition* bagi kedua negara di wilayah yang dipersengketakan dengan Jepang. Pertama, Rusia memang memandang Tiongkok sebagai partner kerja sama yang cukup strategis khususnya di bidang militer. Namun, kerja sama kedua negara tersebut hanyalah sampai pada level pelaksanaan program latihan bersama militer. Setidaknya dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, terdapat latihan rutin maritim tahunan atau Joint Sea yang dilaksanakan oleh angkatan laut Russian Armed Force dengan People Liberation Army (Meick, 2017). Kedua, upaya penolakan terhadap dominasi oleh Rusia terhadap Tiongkok juga terlihat melalui penolakan Rusia terhadap tawaran *mutual recognition* Tiongkok terkait wilayah sengketa kedua negara dengan Jepang. Hal ini ditunjukkan melalui sikap tegas Rusia yang menolak penawaran Tiongkok dalam sebuah kesepakatan untuk saling mendukung klaim masing-masing di wilayah yang dipersengketakan dengan Jepang. Tiongkok akan mengakui Kepulauan Kuril Selatan sebagai Wilayah Utara Rusia jika Rusia mendukung klaim Tiongkok atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu (Streltsov, 2016). Meskipun demikian, kedua indikator tersebut tidaklah terlalu kuat jika dijadikan sebuah justifikasi sikap penolakan Rusia terhadap dominasi Tiongkok. Hal ini dikarenakan Rusia belum ingin melangkah terlalu jauh dari Tiongkok. Rusia melihat Tiongkok memiliki sebuah kepentingan untuk mendorong munculnya infrastruktur keamanan baru di kawasan Asia Pasifik sebagai respon atas ketidaknyamanan Tiongkok atas *status quo* yang mereka miliki di kawasan saat ini (Voda, 2016). Rusia menyadari bahwa kebijakan untuk menahan laju pertumbuhan Tiongkok adalah sebuah langkah yang kontraproduktif sehingga Rusia melihat bahwa penguatan peran konstruktif Rusia di kawasan Asia Pasifik dapat diupayakan melalui peningkatan kerja sama komprehensif dengan Tiongkok (Voda, 2016). Pada akhirnya, adanya kebijakan *rapprochement* terhadap Jepang menunjukkan bahwa Rusia memiliki pergerakan yang lebih fleksibel karena harmonisasi hubungan dengan Jepang membuktikan bahwa Rusia memasukkan Jepang sebagai variabel baru dalam penguatan posisi Rusia di kawasan Asia Pasifik sekaligus salah satu solusi bagi stagnasi ekonomi Rusia.

Sedangkan Jepang sendiri dengan adanya pembaharuan US-Japan Defense Guidelines pada tahun 2015 membuat Jepang semakin fleksibel dalam menghadapi kebijakan Amerika Serikat. Melalui pembaharuan tersebut, relasi Jepang dan Amerika Serikat menuju sebuah fase baru yang lebih menekankan pada hubungan simetris dan setara (Jannuzi, 2016). Selain itu, pergeseran sikap Jepang dari yang awalnya sangat menjunjung tinggi *power acceptance* terhadap Amerika Serikat, mulai bergerak menuju ke arah *power rejection*. Hal ini terepresentasikan secara jelas melalui keputusan Shinzo Abe untuk menemui Presiden Putin pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin di Sochi pada bulan Mei 2016. Sikap tersebut dianggap bertolak belakang dengan instruksi Presiden Obama terhadap Abe untuk menunda terlebih dahulu upaya penyelesaian permasalahan Kepulauan Kuril Selatan hingga berakhirnya sanksi ekonomi terhadap Rusia (Togo, 2016). Namun, dengan adanya inisiatif Abe untuk bertemu dengan Putin di Sochi pada 6 Maret 2016 mengindikasikan bahwa Jepang memainkan posisi yang lebih fleksibel sekaligus independen dalam mengupayakan harmonisasi hubungan bilateral dengan Rusia sehingga secara perlahan mampu mengubah pandangan negatif Rusia terhadap posisi Jepang. Bahkan, semakin menghangatnya hubungan dengan Rusia membuat Jepang secara tidak langsung menggoyahkan aliansinya dengan Amerika Serikat yang telah terjalin sejak akhir Perang Dunia Kedua (Jannuzi, 2016). Hal ini bahkan juga membuat Moskow berfokus pada asumsi bahwa Jepang mulai menarik diri dari konsolidasi *Western Front* yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan menjadi semakin pragmatis terhadap Rusia. Oleh karena itu, Rusia kemudian memandang bahwa Jepang dapat berperan sebagai mediator utama yang mampu menyampaikan posisi dan kepentingan Rusia kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa (Streltsov, 2016). Hal ini dibuktikan dengan posisi Jepang sebagai satu-satunya mitra kerja sama paling terpercaya Rusia di antara negara-negara G-7 lainnya. Melalui situasi dan kondisi tersebut, Jepang mulai menunjukkan preferensi kebijakan *dominance denial* dalam konteks hubungannya dengan Amerika Serikat.

Terkait indikator terakhir yakni *indirect balancing*, penulis menyatakan bahwa Rusia dan Jepang belum mengimplementasikan kebijakan apapun terkait indikator tersebut dalam konteks relasi kedua negara tersebut terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Rusia masih melihat Tiongkok sebagai salah satu partner strategis dalam penguatan perannya baik di level regional dan global. Hal ini terlihat melalui pernyataan Rusia bahwa hubungannya dengan Tiongkok merupakan sebuah pilihan strategis dan telah terikat melalui justifikasi historis serta optimalisasi keuntungan ekonomi politik. Selain itu, Rusia juga melihat bahwa adanya posisi revisionis Tiongkok terhadap infrastruktur keamanan di kawasan Asia-Pasifik yang lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh Amerika Serikat sebagai sebuah hal yang positif. Oleh karenanya, Rusia melihat bahwa kebijakan penentangan terhadap Tiongkok adalah sebuah hal yang kontraproduktif terhadap upaya penguatan posisi Rusia di kawasan Asia Pasifik (Voda, 2016). Sedangkan Jepang melihat Amerika Serikat sebagai aliansi strategis dalam aspek keamanan dan pertahanan. Tanpa adanya proyeksi *power* Amerika Serikat, Jepang akan menghadapi dilema lain terkait instabilitas keamanan di level regional. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh penting Amerika Serikat dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik (Jannuzi, 2016). Selain itu, dalam melihat progresifitas Tiongkok, Jepang juga masih membutuhkan kerja sama dengan Amerika Serikat meskipun Jepang belum mampu memastikan bagaimana respon Amerika Serikat dalam menghadapi peluang terjadinya konflik terbuka di antara Jepang dan Tiongkok. Selain itu, dalam isu nuklir Korea Utara, Amerika Serikat masih berperan cukup sentral dalam upaya Jepang melakukan *counterweight* ancaman nuklir Korea Utara. Oleh karenanya, meski mulai menunjukkan kebijakan yang lebih fleksibel dan independen dalam natur hubungannya dengan Amerika Serikat, namun Jepang belum menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas untuk mulai meninggalkan aliansinya dengan Amerika Serikat dan memainkan strategi *balancing* guna mereduksi pengaruh Amerika Serikat khususnya di kawasan Asia Timur.

## Kesimpulan

Transisi tatanan internasional menuju ke arah hegemoni hierarkis yang disertai dengan fase dekonsentrasi internasional berperan cukup signifikan dalam mendorong Rusia dan Jepang untuk saling mendekat satu sama lain. Dalam era transisional tersebut, terdapat renegotiasi terkait konsensus nilai, hak, dan kewajiban di antara *great powers* dan *non-great powers* sehingga tercipta sebuah *ranking power* di dalam relasi antar negara. Hal tersebut mendorong sebuah pola interaksi yang cukup kompleks di antara negara-negara baik di level regional maupun global. Lebih jauh, adanya fase dekonsentrasi internasional yang melibatkan kontestasi dua negara *pre-eminent* yakni negara *delegitimized world power* dan *challenger* semakin menambah ketidakpastian situasi dan kondisi perpolitikan global. Status Rusia dan Jepang sebagai negara *third-tier* di balik kontestasi dua negara *pre-eminent* yakni Amerika Serikat yang berpredikat sebagai *delegitimized world power* dan Tiongkok yang berpredikat sebagai *challenger* membuat kedua negara berada dalam posisi yang cukup sulit. Posisi sulit tersebut dikarenakan baik Jepang maupun Rusia memiliki hubungan yang cukup erat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Di satu sisi, kontestasi Amerika Serikat-Tiongkok dapat menjadi salah satu determinan yang mendorong transformasi kedua negara tersebut sebagai potensi ancaman di masa depan bagi Jepang dan Rusia. Namun di sisi lain, baik Jepang maupun Rusia masih melihat bahwa relasi mereka dengan Amerika Serikat dan Tiongkok adalah relasi yang strategis sekaligus esensial. Oleh karena itu, baik Jepang maupun Rusia berusaha memainkan kebijakan *middle-way* dalam bentuk strategi *hedging* yang berusaha menjaga kepentingan kedua negara di masa depan. Manifestasi nyata strategi tersebut oleh Jepang dan Rusia dapat terlihat melalui pengimplementasian empat dari lima indikator utama kebijakan *hedging* menurut Cheng-Chwee yakni *limited bandwagoning*, *binding engagement*, *economic pragmatism*, dan *dominance denial*. Implementasi strategi tersebut menunjukkan posisi Jepang dan Rusia yang cukup fleksibel dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian perpolitikan global.

## Daftar Pustaka

- Akaha, Tsuneo. 2016. Russia and Japan: from Distant Neighbors to Future Partners, dalam Victoria Panova & Artyom Lukin (eds.) *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University.
- Bergsten, Fred, et al. 2008. *China's Rise: Challenges and Opportunities*. Washington D.C., Peterson Institute for International Economics.
- Cheng-Chwee, Kuik. 2008. The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China, *Contemporary Southeast Asia*, **30 (2)**, August 2008.
- Global Fire Power. 2017. *2017 Russian Federation Military Strength* [online]. [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=russia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia) [Diakses 10 Oktober 2017].
- Goh, Evelyn. 2006. Understanding 'hedging' in Asia-Pacific security, *PacNet* 43, August 31.
- \_\_\_\_\_. 2013. *The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia*. Oxford, Oxford University Press.
- Goldstein, Lyle J. 2017. *A China-Russia Alliance?* [online]. <http://nationalinterest.org/feature/china-russia-alliance-20333> [Diakses pada 1 November 2017].

- Helleiner, Eric, 2008. *The Evolution of the International Monetary and Financial System*, *Global Political Economy*. Oxford, Oxford University Press.
- Hudson, Valerie M. 2014. *Foreign Policy Analysis: Classical and Contemporary Theory*. Maryland, Rowman & Littlefield.
- Irish Times. 2014. *China Opposes Sanctions on Russia over Ukraine* [online]. <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/china-opposes-sanctions-on-russia-over-ukraine-1.1776366> [Diakses 5 Oktober 2017].
- Jannuzi, Frank. 2016. Japan-Russia Relations through the Lens of the U.S.-Japan Alliance, dalam Gilbert Rozman (ed.) *Japan-Russia Relations: Implications for the U.S.-Japan Alliances*. Washington D.C, Sasakawa Peace Foundation USA.
- Kashin, Vasili. 2017. *Kenapa Rusia dan Tiongkok Tak Kunjung Membentuk Aliansi Militer?* [online]. <https://id.rbth.com/technology/2017/04/06/kenapa-rusia-dan-tiongkok--kunjung-membentuk-aliansi-militer-qyx735912> [Diakses 1 November 2017].
- Khuziyatov, Tagir. 2016. How to Break a Vicious Circle and Start a Virtuous Circle in Russo-Japanese Economic Relations, dalam Victoria Panova & Artyom Lukin (eds.) *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University
- Meick, Ethan. 2017. China-Russia Military-to-Military Relations: Moving Toward a Higher Level of Cooperation, *Staff Report U.S.-China Economic and Security Review Commission*, March 20.
- Ministry of Foreign Affairs. 2017. *International Organizations* [online]. [http://www.mofa.go.jp/about/emb\\_cons/protocol/organization.html](http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/organization.html) [Diakses 25 Oktober 2017].
- Newman, Edward. 2000. Japan and International Organization, *Japanese Foreign Policy Today*. New York, Palgrave MacMillan.
- Panova, Victoria & Artyom Lukin. 2016. Introduction and Executive Summary, *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University.
- Streltsov, Dmitry. 2016. Russo-Japanese Relations: A Skeptical View, dalam Victoria Panova & Artyom Lukin (eds.) *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University.
- Togo, Kazuhiko. 2016. Where Do Japan-Russia Territorial Negotiations Stand Now? A View from Japan, dalam Victoria Panova & Artyom Lukin (eds.) *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University.
- Voda, Kristina. 2016. Russia and Japan: Promoting Cooperation and Security in the Asia-Pacific Region, dalam Victoria Panova & Artyom Lukin (eds.) *Russia and Japan Looking Together into the Future*. Vladivostok, Far East Federal University.
- Wallerstein, Immanuel. 2003. *Decline of the United States: The Eagle Has Crash Landed*, *The Decline Of American Power: The U.S. in a Chaotic World*. New York: the New Press.

